



PENCEGAHAN KEMUNCULAN RADIKALISME DI ERA *POST-TRUTH* MELALUI SOSIALISASI LITERASI MEDIA DI DESA PESANTREN KEDIRI

Nurul Dwi Lestari

¹Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: nuruldwilestari@iainkediri.ac.id

ABSTRACT

Social media is a new phenomenon that is followed by modern society. The public needs to know that behind the freedom of social media as a means of self-expression of opinion, there are various domains of rules and ethics that must be met. The purpose of this community service is to describe the implementation of community service activities to prevent the emergence of radicalism in the post-truth era through media literacy socialization in the Pesantren Village, Kediri City. The specific objectives of this study are to describe: (1) the public's view of radicalism in the post-truth era, and (2) the implementation of media literacy socialization to prevent radicalism in the post-truth era. This community service method uses the Participatory Action Research (PAR) method by involving community participation to encourage better action. Media literacy socialization in the Pesantren Village, Kediri City discussed four efforts to prevent radicalism due to hoax news, including (1) reopening the village library equipped with facilities for accessing the internet wisely, (2) creating discussion groups on social media as a means of communication that "anti-hoax" and gathering facilities, (3) holding seminars or workshops to share with the public about updated information on technological developments, (4) supporting the need to develop education and learning programs for honesty, tolerance, and staying away from extreme attitudes. The results of this community service activity show that the community is starting to understand the importance of media literacy, namely having critical thinking power and being good at making the right decisions in responding to the dissemination of information on social media.

Keywords: radicalism, media literacy, post-truth era

ABSTRAK

Media sosial menjadi fenomena baru yang digandrungi masyarakat modern. Masyarakat perlu mengetahui di balik kebebasan bermedia sosial sebagai alat ekspresi diri dalam berpendapat, terdapat berbagai ranah aturan serta etika yang harus dipenuhi. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka mencegah kemunculan radikalisme di post-truth era melalui sosialisasi literasi media di Desa Pesantren Kota Kediri. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) pandangan masyarakat terhadap radikalisme di post-truth era, dan (2) pelaksanaan sosialisasi literasi media untuk mencegah radikalisme di post-truth era. Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong terjadinya aksi yang lebih baik. Sosialisasi literasi media di Desa Pesantren, Kota Kediri membahas empat upaya mencegah radikalisme akibat berita hoax, mencakup (1) membuka kembali perpustakaan desa dengan dilengkapi sarana mengakses internet secara bijak, (2) membuat grup-grup diskusi di media sosial sebagai sarana komunikasi yang "anti hoax" dan sarana silaturahmi, (3) menyelenggarakan seminar atau workshop untuk berbagi kepada masyarakat mengenai informasi perkembangan teknologi yang update, (4) mendukung perlunya dikembangkan program pendidikan dan pembelajaran sikap jujur, toleransi, dan menjauhi sikap ekstrem. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya literasi media yaitu memiliki daya pikir kritis serta pandai mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi penyebaran informasi di media sosial.

Kata kunci: radikalisme, literasi media, era *post-truth*

1. PENDAHULUAN

Pada era saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa media sosial menjadikan informasi kini terkesan "riuh" dan bising". Informasi yang muncul di berita bahkan terkadang dibesar-besarkan hingga membuat kebenaran dari suatu berita kini seringkali dipertanyakan. Pada post-truth saat ini, putaran informasi bergerak begitu cepat, bahkan dalam hitungan detik berita *hoaks* dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui media sosial. Era *post-truth* merupakan sebuah era di mana sebagian besar dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dengan menyebarkan berita *hoax* ke dalam pusaran arus informasi yang serba cepat ini, orang-orang akan mengira bahwa berita tersebut benar adanya. Ditambah, saat ini media sosial publik, seperti *twitter*, *instagram*,

tiktok, facebook, youtube, dan media lainnya terdapat fitur komentar di mana semua orang dari berbagai kalangan dapat memberikan komentar tentang berita *hoax* tersebut. Muncul istilah “akun bayaran” yang memang sengaja “dibayar” untuk berkomentar dengan maksud persetujuan sehingga membuat pembaca lainnya yakin atas kebenaran berita tersebut.

Beberapa berita seringkali memantik masyarakat untuk bersikap “radikal”. Dalam hal ini terjadi jika berita yang disuguhkan memiliki kesenjangan bagi masyarakat. Sebagai contoh, para pemimpin, pejabat, hingga polisi, jaksa, yang seringkali muncul di publik, masyarakat atau lebih dikenal dengan “netizen” umumnya menyoroti kemewahan yang mereka kenakan, mulai dari jam tangan, tas mewah, hingga pakaian bermerek. Beberapa netizen lantas membuat berita hingga sampai ke penjuru tanah air. Masyarakat yang dalam kondisi saat ini, terlebih banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera, menjadikan kemunculan sikap radikalisme di antara mereka yang menganggap dan beropini bahwa kekayaan tersebut bisa jadi didapatkan dari hasil suap atau hasil dari kegiatan tidak wajar lainnya. Hal inilah yang menyebabkan “badai informasi” di kalangan media.

Problem masyarakat pada era saat ini bukan lagi kesulitan mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Masyarakat haruslah bijak dalam menyaring informasi di media. Informasi dan transaksi elektronik kini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, segala konten *hoax* yang disebar dapat berakibat buruk atau bahkan bisa menjadikan para penyebar berita *hoax* tersebut mendapatkan hukuman pidana.

Selain ditandai dengan maraknya berita *hoax* di media sosial, era *post-truth* juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Kebenaran suatu informasi menjadi ikhwal yang kini sering dipertanyakan dan pada akhirnya nalar publik terlalu lunak dan mudah dimanipulasi oleh informasi palsu. Tanggung jawab literasi seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pembaca, melainkan juga para ahli dan media yang memiliki tanggung jawab utama pada informasi yang mereka suguhkan agar tercipta masyarakat madani yang “melek informasi”.

Media Literacy atau literasi media, secara harfiah terdiri atas dua kata, yaitu literasi dan media. Media dimaknai sebagai tempat pertukaran pesan. Adapun literasi berarti melek. Berdasarkan makna kedua kata tersebut, dapat diartikan literasi media sebagai kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa (Apriadi, 2013:7). pada dasarnya, istilah literasi digunakan sebagai dasar atas hakikat kemampuan membaca dan menulis di media massa/media sosial merupakan suatu kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan.

Radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan (Ariwidodo, 2017). Radikalisme dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari keagamaan, misalnya, radikalisme diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga secara umum para penganut dari paham ini menggunakan kekerasan kepada penganut lain yang memiliki paham/aliran yang berbeda dengan tujuan mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Dalam konteks penelitian ini, radikalisme



akibat kemunculan berita *hoax* perlu untuk segera diminimalisir agar tidak menimbulkan perpecahan dan kesenjangan sosial.

Sebaran berita yang semakin cepat dan masif di dunia digital menjadi peluang besar bagi golongan untuk menyebarkan paham dan atau berita yang bertujuan untuk mengiring massa agar mempercayai paham yang mereka gulirkan dalam hal ini salah satu paham yang terus didengungkan secara terselubung maupun terang-terangan adalah radikalisme yang sudah tidak sekedar isu. Media massa selayaknya menjadi tempat tertampungnya informasi yang dapat dipercayai kebenarannya. Hal ini menjadi momok sebab saat ini media seringkali menyampaikan ketidakbenaran informasi kepada publik, entah dari mana asal muasal informasi tersebut didapatkan. Pada akhirnya, hal ini menjadi suatu tantangan, permainan, dan kebiasaan karena semakin banyak berita viral yang disebar, maka semakin banyak pula pembaca yang antusias mencari lebih mendalam kronologi atau informasi lebih detail dari berita tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dirasa perlu bagi peneliti untuk mencegah kemunculan radikalisme di *post-truth era* melalui sosialisasi literasi media yang dilaksanakan di Desa Pesantren, Kota Kediri. Kemunculan berita-berita palsu atau belum tentu kebenarannya dimulai dari persepsi sekelompok masyarakat setelah membaca berita di media sosial. Penyebaran berita-berita bohong ini bisa jadi meluas hingga kelompok-kelompok yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini, pengabdian memulai sosialisasi pada kelompok kecil masyarakat, yaitu di Desa Pesantren, Kota Kediri dengan harapan masyarakat dapat lebih bijak menyaring berita di media sosial melalui kemampuan literasi media. Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya mencegah kemunculan radikalisme di *post-truth era* melalui sosialisasi literasi media di Desa Pesantren Kota Kediri. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) pandangan masyarakat terhadap radikalisme di *post-truth era*, dan (2) pelaksanaan sosialisasi literasi media untuk mencegah radikalisme di *post-truth era*.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pesantren, Kota Kediri ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu riset yang dilakukan untuk mengetahui kebiasaan atau kegiatan kelompok masyarakat tanpa mengkaji dan mengetahui apa yang terjadi dan tanpa mengkaji, mengetahui, maupun memperbaiki tatanan sosial pada subjek tersebut. Dalam metode PAR, seorang pengabdian tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat yang diteliti, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja sama bersama warga dalam melakukan PAR. Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode PAR ini adalah (1) untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi media agar lebih bijak bermedia sosial dan mengakses informasi; (2) untuk mengubah cara pandang kegiatan pengabdian sebagai proses partisipasi aktif; dan (3) membawa perubahan nilai sosial terkait bermedia sosial agar terhindar dari perbuatan fitnah dan mencegah kemunculan radikalisme akibat salah menafsirkan informasi.

Terdapat empat siklus dalam metode PAR untuk dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan proses penelitian berbasis pemberdayaan masyarakat. Menurut Rahmat & Mirnawati (2019:66-67), siklus tersebut dikenal sebagai KUPAR (*to know, to understand, to plan, dan to reflection*). Siklus pertama, yaitu *to know* (untuk mengetahui) merupakan proses awal dalam pemberdayaan dengan mempertimbangkan pandangan subjektif peneliti terhadap kehidupan masyarakat yang diteliti, misalnya, mencakup sumber daya alam dan manusia, dalam rangka membangun interaksi dengan pengabdian agar diterima masuk ke masyarakat melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu bersama perangkat desa.

Siklus kedua, yaitu *to understand* (untuk memahami). Pada siklus ini pengabdian serta masyarakat Desa Pesantren diberdayakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka, kemudian dikorelasikan dengan aset-aset yang dimiliki masyarakat desa tersebut dengan tujuan mewujudkan komitmen masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang ada dalam kehidupan mereka.

Siklus ketiga, yaitu *to plan* (untuk merencanakan) diartikan sebagai proses perencanaan aksi-aksi strategis yang sebelumnya telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini yaitu mempertimbangkan keseimbangan antara human resources dan natural resources serta alur stakeholder yang menghimpun masyarakat tersebut. Tahap ini harus dioptimalkan dengan menghimpun masyarakat secara penuh atas penyelesaian masalah yang terjadi.

Siklus keempat, yaitu *to action* (melancarkan aksi). Tahap ini merupakan implementasi hasil pemikiran masyarakat dengan tujuan untuk membangun, mengelola, mengubah, menajamkan aset-aset yang dimiliki masyarakat sehingga dapat difungsikan secara optimal dan proporsional. Siklus kelima atau tahapan terakhir dalam metode PAR, yaitu *to reflection* (refleksi). Pada tahap ini peneliti dan masyarakat mengevaluasi dan memonitor aksi pemberdayaan yang telah dilakukan di Desa Pesantren. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah menjadikan pemberdayaan berjalan terarah dan terukur.

Berdasarkan prosedur dan siklus yang telah dikemukakan sebelumnya, tahapan kegiatan pengabdian dengan metode PAR yang dilakukan oleh pengabdian di Desa Pesantren, Kota Kediri, secara urut meliputi langkah berikut: (1) peneliti merumuskan tahapan kegiatan bersama dengan kelompok kerja KKN-DR 041 IAIN Kediri; (2) turun ke Desa Pesantren, Kota Kediri dan hidup melebur bersama masyarakat (*live in*); (3) membangun hubungan kekerabatan bersama masyarakat desa; (4) pengumpulan data melalui observasi dan wawancara; (5) membuat analisis kasus struktural, dalam konteks ini pengabdian menemukan isu-isu yang mengarah pada radikalisme akibat penggunaan media sosial tanpa kode etik; (6) menyusun aksi. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, peneliti menekankan pada situasi masyarakat di Desa Pesantren, Kota Kediri dan melebur di dalamnya.

Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi literasi media guna mencegah kemunculan radikalisme pada era *post-truth* ini dilaksanakan di Desa Pesantren, Kota Kediri. Dalam riset ini, sesuai dengan karakteristik dalam metode PAR, pengabdian tidak memisahkan diri dari situasi masyarakat, melainkan melebur ke dalamnya dan bekerja sama dengan warga untuk melakukan partisipasi, aksi, dan penelitian terkait literasi media untuk mencegah radikalisme. Tujuan dipilihnya metode PAR dalam kegiatan pengabdian ini mencakup tiga hal, yaitu (1) untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat secara kritis tentang pentingnya memahami literasi media, (2) untuk mengubah cara pandang masyarakat melalui partisipasi aktif dalam mencegah radikalisme khususnya terkait unsur SARA yang berkembang di masyarakat, dan (3) membawa masyarakat pada perubahan nilai sosial, yaitu lebih bijak dan kritis dalam bermedia sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan pengabdian berkaitan dengan bagaimana urgensi moderasi beragama untuk mencegah radikalisme di *post-truth era* diperoleh hasil mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi media untuk mencegah radikalisme dan pandangan radikalisme menurut masyarakat Desa Pesantren, Kota Kediri. Data hasil kegiatan pengabdian



masyarakat diperoleh dari sumber data yang terdiri atas informan dan responden, serta data observasi dan dokumentasi. Berikut paparan sekaligus analisis data dari hasil pengabdian di lapangan.

Pandangan Masyarakat terhadap Radikalisme di *Post-Truth* Era

Informasi kini dapat disebarakan oleh siapa saja, tidak hanya media online. Semua orang dengan profesi apapun dan tidak memandang usia dapat membuat berita dengan bermodal media elektronik. Disebabkan oleh kecanggihan digital, alat komunikasi *handphone* yang dahulu hanya bisa dipakai untuk komunikasi, kini bisa digunakan untuk mengabadikan momen ataupun peristiwa. Terkadang, kemiripan wajah maupun tubuh membuat seseorang yang berniat “jahat” membuat berita palsu untuk disebarakan. Alhasil, tokoh publik yang diberitakan tersebut mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat hingga membuat karirnya hancur akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tidak semua berita yang muncul dalam berita online dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karenanya, dibutuhkan kemampuan literasi media agar masyarakat dapat memilah-milah berita untuk dijadikan konsumsi publik. Revolusi internet, bahkan kini menyingkirkan media massa yang selama ini digunakan masyarakat sebagai satu-satunya sumber informasi. Media online hadir dan menjadi paling terdepan dari segi kecepatan menyiarkan berita karena untuk menyebarkan informasi hanya dibutuhkan jaringan internet, perangkat komputer, laptop, dan *smartphone*. Media online memungkinkan pembaca memperoleh berita secara cepat sehingga saat ini justru masyarakat memperoleh berita “viral” pertama kali bukan melalui media massa, melainkan media online.

Sebelum adanya kecanggihan internet, dahulu masyarakat menggunakan media televisi dan radio untuk mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya. Kini, dengan adanya kecanggihan internet, media online mulai bermunculan menyuguhkan informasi untuk masyarakat. Bahkan, masyarakat dapat menjadi produsen (pembuat informasi) maupun konsumen (penerima informasi). Dengan kecanggihan fitur pembuat video saat ini, produsen informasi dapat memadukan gambar, video, teks, dan suara dengan mudah dan praktis sehingga video berisi informasi itu pun lebih cepat sampai ke masyarakat, sebelum televisi menayangkannya. Dalam ikhwal ini, pada akhirnya para jurnalis atau pencari berita membutuhkan informasi dari masyarakat sebagai bahan untuk liputan berita. Munculnya berita *hoax* dapat terjadi pada proses ini, di mana narasumber memberikan keterangan palsu, atau masyarakat menambahkan informasi yang sifatnya belum pasti kebenarannya dan disampaikan kepada jurnalis. Bagi seorang jurnalis yang profesional, mereka cenderung memberikan berita yang benar mengingat ada kode etik jurnalistik yang harus mereka laksanakan.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 7 (ayat 2) disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam UU tersebut, diuraikan 11 kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh para jurnalis, mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 11. Pelarangan untuk membuat berita bohong dan fitnah disebutkan dalam kode etik jurnalistik Pasal 4, sedangkan untuk mengantisipasi berita *hoax*, wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Aturan ini diuraikan pada Pasal 3 kode etik jurnalistik.

Selain para jurnalis, masyarakat juga harus memiliki kemampuan literasi media untuk dapat memilah-milah informasi yang valid kebenarannya. Menurut Hobbs (1996), kemampuan literasi media merupakan kemampuan seseorang dalam mengakses dan menganalisis secara kritis pesan-

pesan dalam media, kemudian menggunakan alat media untuk menciptakan pesan. Dalam bukunya, Hobbs mengibaratkan literasi media sebagai suntikan informasi di mana warga secara mandiri mampu menghasilkan antibodi untuk menanggulangi berbagai potensi penyakit psikologis pada diri mereka akibat pengaruh konten buruk dari media sosial.

Dalam KBBI (2018), radikalisme diartikan sebagai paham/aliran yang menghendaki perubahan secara drastis. Senada dengan itu, kamus ilmiah populer mendefinisikan radikalisme sebagai inti dari perubahan. Radikalisme seringkali menjadi momok terkait hidup beragama, di mana radikalisme dianggap sebagai perilaku yang menyalahi syariat agama. Radikalisme muncul akibat adanya dua pihak yang bertikai. Keduanya ingin merealisasikan target-target tertentu, misalnya keinginan suatu kelompok untuk mengubah situasi sosial. Kemunculan kelompok radikal di Indonesia bukanlah menjadi hal baru (Khamami, 2002:32). Kelompok radikal tersebut telah menyalahi aturan agama sebab pemaksaan terhadap suatu aliran untuk mengikuti pada akhirnya menyalahi kebebasan memeluk agama di Indonesia.

Post-truth era identik dengan media sosial dan perkembangan teknologi yang kian pesat sehingga mengharuskan masyarakat pandai memilih sumber informasi yang akurat. Berdasarkan fakta yang diperoleh pengabdian melalui wawancara dengan tokoh agama di Desa Pesantren, Kota Kediri ditemukan keterkaitan antara radikalisme dengan perkembangan era *post-truth*. Akar permasalahan yang selama ini terjadi, yaitu kemunculan radikalisme yang melibatkan paham-paham garis keras; disebabkan oleh banyaknya kalangan yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita *hoax* atau berita bohong. Para oknum-oknum tersebut menghina, menghasut, menebar ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kecanggihan teknologi yang membuat berita sangat mudah disebarkan dari seseorang ke orang lain, bahkan hanya dalam hitungan detik. Pada Tabel 1. merupakan uraian penggunaan media sosial yang terdapat di beberapa masyarakat Desa Pesantren.

Tabel 1.

Penggunaan Media Online oleh Masyarakat Desa Pesantren, Kota Kediri

Jenis Kegiatan	Uraian
Penggunaan media online di kalangan masyarakat	<p>Berdasarkan survei yang telah dilakukan, hampir sebagian besar masyarakat menggunakan <i>smartphone</i> dalam kesehariannya. Tidak memandang usia, <i>smartphone</i> digunakan mulai dari anak-anak balita, pelajar usia sekolah SD/SMP/SMA, pekerja/karyawan, hingga ibu rumah tangga. Berikut uraian lebih lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bagi pelajar, <i>smartphone</i> digunakan untuk mengakses materi pelajaran sehingga membantunya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Selain tugas-tugas sekolah, <i>smartphone</i> terkait penggunaannya sebagai media sosial digunakan untuk hiburan dan eksistensi diri.- Bagi pekerja/karyawan, <i>smartphone</i> digunakan untuk hiburan dikala senggang. Selain itu, mereka juga menggunakannya untuk mengakses peristiwa yang sedang “viral”. Sebagian juga digunakan untuk mengakses informasi yang mendukung pekerjaan mereka. Sama halnya dengan para pelajar, sebagian karyawan/pekerja yang cenderung ekstrovert menggunakan media sosial sebagai sarana eksistensi diri.- Bagi ibu rumah tangga, hampir sebagian besar <i>smartphone</i> digunakan untuk komunikasi. Selain itu, mereka juga menggunakannya untuk <i>update</i> info terkait kebutuhan dalam rumah tangga, misalnya resep membuat makanan dan lainnya. Sama halnya dengan pelajar dan para pekerja, <i>smartphone</i> digunakan untuk mengakses informasi yang sedang aktual di masyarakat dan sebagai hiburan.



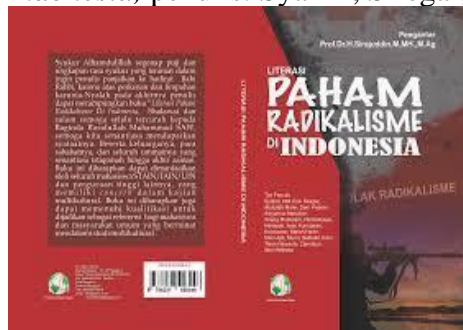
	Seiring penggunaan media sosial yang semakin meluas, isu radikalisme terkait respon masyarakat terhadap berita yang sedang viral di media sosial tidak begitu mengkhawatirkan atau masih dalam tahap “wajar”. Meskipun demikian, sosialisasi literasi media di desa ini perlu untuk dilakukan untuk mencegah munculnya radikalisme dan menjadikan masyarakat lebih bijak bermedia sosial.
Sasaran sosialisasi literasi media	Sasaran kegiatan sosialisasi literasi media untuk mencegah munculnya radikalisme akibat penggunaan media sosial yang semakin tak terkontrol, yaitu masyarakat Desa Pesantren, Kota Kediri. Radikalisme yang mungkin terjadi pada remaja dapat terjadi karena kurangnya perhatian orang tua untuk melakukan didikan terhadap anak. Radikalisme juga terjadi akibat dorongan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagian besar sasarannya adalah remaja yang mudah menjadi sasaran penebar kebencian dan radikalisme. Terlebih pada usia remaja, rasa ingin tahu dan keinginan terhadap eksistensi diri masih tinggi sehingga kurang dalam mengatur emosional diri.
Dampak kurangnya literasi media	Saat ini, banyak pengguna media sosial yang berdampak isu radikalisme akibat berita-berita yang mereka baca di media sosial. Bentuk radikalisme, misalnya para user <i>twitter</i> mulai meretweet konten-konten yang viral sebagai bentuk respon terhadap fenomena/peristiwa besar sehingga memunculkan radikalisme dan perpecahan. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi media sehingga respon yang diberikan bukan lagi menjadi ikhwal yang diharapkan.

Radikalisme yang muncul akibat kurangnya literasi media saat ini telah berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan semakin canggihnya teknologi dan kemudahan untuk mengakses. Bahkan, untuk memvalidasi sebuah video yang viral di jagat maya, dibutuhkan peran pakar telematika untuk mengetahui keaslian dari video tersebut. Sebab, saat ini foto bahkan video dapat diedit sedemikian rupa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menciptakan kebohongan. Para pengedit video dan foto ini bisa jadi diminta oleh oknum tertentu untuk melakukannya atau justru kemauannya sendiri untuk menciptakan kehebohan publik.

Radikalisme di Indonesia identik dengan fanatisme beragama. Masyarakat Desa Pesantren, Kota Kediri memahami radikalisme sebagai penyimpangan dalam memahami suatu agama. Kelompok radikal tertentu membuat kehebohan dan menginginkan perubahan serta kecenderungan untuk berpihak pada kaumnya. Oleh karena itu, paham mengenai radikalisme seringkali dicegah melalui moderasi beragama. Hasil dokumentasi peneliti ada pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1.

E-Book sebagai panduan tentang Paham Radikalisme berjudul Literasi Paham Radikalisme di Indonesia, penulis: Syahril, Siregar,A.dkk:2020)



Gambar 2.

Pembelajaran dan wawasan terhadap anak tentang pemahaman radikalisme, bermedia sosial serta pentingnya moderasi beragama



Banyak kalangan yang menyalahgunakan media sosial yang justru sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian dengan upaya menghujat, menghasut, memberikan berita hoax sehingga memunculkan paham radikal akibat kesenjangan terhadap ketidakadilan di negeri ini. Pada akhirnya paham radikal akibat penggunaan media sosial tumbuh subur di Indonesia dan membuat kekerasan dan cukup memprihatinkan akibat penyalahgunaan media online.

Sosialisasi Literasi Media untuk Mencegah Radikalisme di *Post-Truth Era*

Sosialisasi literasi media yang dilaksanakan di Desa Pesantren, Kota Kediri dilakukan melalui enam langkah. *Pertama*, membuka kembali perpustakaan desa dengan dilengkapi sarana mengakses internet secara bijak. Dalam perpustakaan juga terdapat barcode yang jika discan dapat menuju pada website perpustakaan nasional. Melalui pembiasaan membaca buku, masyarakat akan menjadi lebih “melek informasi” melalui langkah digital. Saat ini perpustakaan nasional menyediakan barcode yang bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat dapat memilih buku dengan tema beragam secara mudah dan praktis.

Langkah kedua, sebagai bentuk literasi media yaitu membuat grup-grup diskusi di media sosial sebagai sarana komunikasi. *Sharing* atau diskusi perlu dilakukan terkait informasi-informasi yang bermanfaat untuk dibahas. Sebuah komunitas yang baik terbentuk jika anggotanya saling aktif memberikan informasi yang menarik dan dapat dimanfaatkan sebagai “peluang”, baik dalam hal bisnis, pendidikan, maupun bidang lainnya.

Langkah ketiga, yaitu menyelenggarakan seminar atau workshop untuk berbagi kepada masyarakat mengenai informasi perkembangan teknologi yang *update*, sehingga mereka dapat merealisasikannya ke dunia nyata. Seminar atau workshop merupakan kegiatan yang dilakukan para cendekiawan untuk berbagi informasi terkait bidang yang ditekuni. Selain mendapatkan ilmu, masyarakat juga dapat menambah relasi, kawan untuk berbagi hal-hal yang positif.

Langkah keempat, yaitu mendukung perlunya dikembangkan program pendidikan dan pembelajaran sikap jujur, toleransi, dan menjauhi sikap ekstrem. Hal ini perlu bagi kalangan anak muda yang seringkali mudah tersulut emosi dan terpapar radikalisme. Kemampuan literasi media dibutuhkan agar pengguna media sosial selalu konsisten untuk mencari kebenaran, bukan semata-mata menyebarkan informasi tanpa mengetahui isi beritanya. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pengguna media sosial dituntut meningkatkan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skill*) agar menjadi modal utama bagi mereka untuk menggiring beragam opini di medsos. Cogan & Derricott (1998), menegaskan bahwa tantangan globalisasi pada Abad 21 menuntut setiap warga negara memiliki karakteristik, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis dan sistematis.



Kemampuan memposisikan diri terhadap penggunaan media sosial dapat berpengaruh pada berbagai bidang, mencakup ekonomi, sosial, politik, dan agama. Kemampuan tersebut berpusat pada literasi media sosial yang pada prakteknya masyarakat diharapkan mampu menggunakan teknologi secara tepat dan bijak dengan menjunjung tinggi aspek moralitas. Dalam hal ini, kecerdasan masyarakat dibutuhkan untuk menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam bermedia sosial agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, masyarakat hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan kritik, cemoohan, ujaran kebencian yang tidak berdasar, terlebih hingga memublikasikannya. Hal ini sangatlah berbahaya, baik bagi pengguna (*user*) atau tokoh publik yang dikritik.

Pengguna media sosial harus berhati-hati dan benar-benar waspada terhadap segala informasi yang dimuat di dunia maya (*internet*). Mereka haruslah bijak dalam bermedia sosial, dalam artian bersikap moderat dan adil dalam menerima informasi di media sosial. Moderat dan adil dalam bermedia sosial berarti menerima informasi secara objektif, tidak berpihak dan selalu menjadikan media sosial sebagai sarana untuk kebaikan dan lebih baik lagi jika dijadikan sebagai sarana beribadah. Dalam sebuah kaidah ushul fikih berbunyi: *li al-wasail hukm al-maqâshid* yang artinya suatu sarana mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan suatu tujuan.

Kebutuhan masyarakat terhadap media sosial merupakan sebuah keniscayaan di era modern saat ini dimana media sosial menjadi sebuah ketergantungan bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut dalam rangka mencapai *maqâshid al-Syari'ah* (tujuan ajaran Islam), di antaranya *hifz al-'aql*, yaitu perlindungan akal untuk mendapatkan informasi yang baik dan positif, menyampaikan informasi, gagasan, ataupun inovasi kepada masyarakat. Penggunaan media sosial hendaknya dikelola dengan sebaik-baiknya karena dari segi agamis, perilaku ini dapat menjadi sumber kebaikan yang dilipatgandakan. Terdapat tiga hal yang perlu menjadi pegangan masyarakat milenial sebagai pengguna aktif media sosial. Tiga hal tersebut yaitu (1) melakukan hal yang sudah pasti benar dan jelas, (2) mengimbangi perlakuan buruk dengan tindakan baik, dan (3) bergaul dengan manusia yang baik akhlaknya.

4. KESIMPULAN

Kemampuan literasi media dibutuhkan bagi masyarakat era informasi saat ini agar dapat lebih bijak dalam mengolah informasi. Masyarakat diharapkan memiliki daya pikir kritis untuk mengambil keputusan dalam menyikapi penyebaran informasi di media sosial. Hal ini dapat mencegah masyarakat dari sikap radikal yang bisa muncul akibat perasaan tidak adil akibat kesenjangan sosial. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus dalam kubangan lumpur informasi yang tidak pasti kebenarannya di dunia maya. Informasi di media sosial kini banyak mengandung unsur provokasi untuk menggerakkan khalayak ramai yang tidak puas dengan pemerintahan di negeri ini hingga ketidakadilan yang terjadi. Sikap *wasathiyah* dibutuhkan dalam masyarakat agar mereka memiliki keahlian memilih konten informasi yang beredar luas di masyarakat.

Beragam informasi yang tersebar di dunia maya membuat pembaca perlu selektif dalam memilih sumber informasi yang valid. Terlebih, informasi tersebut hendak dibagikan ulang kepada sekelompok masyarakat, maka perlu dikroscek terlebih dahulu kebenaran informasinya. Kemampuan literasi media yang sistematis dibutuhkan agar tercipta pengendalian sikap yang mengarah pada radikalisme. Terutama kemampuan memfilter informasi-informasi yang menyangkut isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) untuk mencegah radikalisme yang mengarah pada perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ucapan Terima Kasih

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, peneliti mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Pesantren, Kota Kediri atas izin yang telah diberikan untuk diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN-DR 046 IAIN Kediri yang telah membimbing pelaksanaan PKM serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Kediri atas izin yang diberikan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dari Rumah (KKN-DR) IAIN Kediri Tahun 2021.

REFERENSI

- Apriadi, T. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariwidodo, E. 2017. *Shifting Paradigma of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia*. Kars Journal of Social and Islamic Culture.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An international perspective on education*. London: Kogan Page.
- Hobbs, R. (1996). Media Literacy, Media Activist. *Telemidium the Journal of Media Literacy*, 48 (1), hlm 16-32.
- KBBI. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online, diakses 22 Juni 2022.
- Khamami, Zada. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Rahmat, A. & Mirnawati, M. Model Participation Action Research dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, (Online), 06 (01): 62-71, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index> diakses 21 Juni 2022.
- Syahril, Siregar, A., Munir, A. dkk. 2020. *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*. Bengkulu: CV. Zigie Utama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Online, <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf> diakses 11 Juli 2022.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Online, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>, diakses 11 Juli 2022.